

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis multikultural

1. Pengertian Manajemen Kurikulum

Manajemen berasal dari bahasa Inggris *to manage* yang berarti mengatur, mengurus dan mengelola.¹ Ramayulis menyatakan bahwa pengertian yang sama dengan hakikat manajemen adalah *Al-Tadbir* (pengaturan). Kata ini merupakan derivasi dari kata *dabbara* (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al-Qur'an seperti firman Allah SWT



“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.”(As-Sajdah :5)

Dari ayat di atas diketahui bahwa Allah SWT. Merupakan pengatur alam. Akan tetapi, sebagai khalifah di bumi ini, manusia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah SWT mengatur alam raya ini.²

Mary Parker Follet mendefinisikan yang dikutip oleh Sulistyorini, bahwa manajemen dipandang sebagai seni untuk melaksanakan pekerjaan

¹Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam Konsep, Strategi Dan Aplikasi*, Cet. I, Yogyakarta: Teras, 2009, h. 7.

² U. Sarfullah, *Manajemen Pendidikan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, h. 10

melalui orang lain.³ Definisi ini mengandung arti bahwa seorang manajer dalam mencapai tujuan organisasi melibatkan orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan, atau berarti tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri.

Manajemen bukan hanya merupakan ilmu dan seni, tetapi kombinasi dari keduanya. Kombinasi ini tidak dalam proporsi yang tetap tetapi dalam proporsi yang bermacam-macam. Pada umumnya para manajer efektif mempergunakan pendekatan ilmiah dalam pembuatan keputusan, apalagi dengan berkembangnya peralatan komputer.

Pengertian manajemen sangat luas, sehingga dalam kenyataannya tidak ada definisi yang digunakan secara konsisten oleh semua orang. Dimock yang dikutip oleh Baharuddi & Umiarso, menyatakan bahwa *Management is Knowing where you want to go shalt you must avoid what the forces are with to which you must deal, and how to handle your ship, your crew affectively and without waste, in the process of getting there.*⁴ Manajemen adalah: Mengetahui kemana yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan apa yang harus dijalankan dan bagaimana mengemudikan kapal anda serta anggota dengan sebaik-baiknya tanpa pemborosan waktu dalam proses mengerjakannya.⁵

Stoener yang dikutip Sulistyorini mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan

³ Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam Konsep, Strategi Dan Aplikasi*, h. 42.

⁴ Baharuddin & Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam Antara Teori Dan Praktek*, Cet. I, Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2012, h. 111.

⁵ *Ibid*, h. 11.

pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Manajemen adalah suatu bidang ilmu pengetahuan (*science*) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat system kerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan Luther Gulick yang dikutip Syaiful Sagala.⁶

Manajemen adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajer. Apabila dipandang sebagai serangkaian kegiatan/proses maka proses itu akan mencakup bagaimana cara mengorganisasi dan mengintegrasikan berbagai sumber untuk mencapai tujuan organisasi (produktivitas dan kepuasan) dengan melibatkan orang, teknik, informasi dan struktur yang dirancang. Kegiatan atau manajerial atau pengelolaan ini meliputi banyak aspek namun, aspek utama dan sangat esensial yaitu aspek yang dikemukakan oleh George dan Terry yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*.⁷

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses yang melibatkan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi *planning*, *organizing*, *staffing*, *leading* dan *controlling*. Sedangkan secara istilah Kata “kurikulum” berasal dari

⁶ Syaiful Sagala, *Manajemen Berbasis Sekolah Dan Masyarakat Strategi Memenangkan Persaingan Mutu*, Cet III, Jakarta: PT. Nimas Multima, 2006, h. 13.

⁷ *Ibid*, h. 14.

bahasa latin *currere* yang berarti *to run* (menyelenggarakan) atau *to run the course* (menyelenggarakan suatu pengajaran). Selanjutnya pengertian kurikulum berkembang menjadi *the course of study* (materi yang dipelajari).⁸ Suatu kurikulum dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid disekolah, atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai.⁹

Murray Print yang menyatakan *Curriculum is a construct of that culture*.¹⁰ Dengan demikian, pengembang kurikulum berbasis multicultural harus berpijak pada kebudayaan dalam mengembangkan kurikulumnya. Namun, pengertian ini hanya melihat kurikulum sebagai produk atau hasil, sementara informasi dan pengetahuan yang terangkai dalam satu disiplin keilmuan akan selalu bertambah, sehingga mustahil dapat memuat dalam satu wujud dokumen kurikulum yang berbentuk *the course of study* (materi yang dipelajari).

Patrick Slattery mengutip William Schubert summarizes menyatakan:

One of the most recent positions to emerge on the curriculum horizon is to emphasize the verbform of curriculum, namely, currere. Instead of taking its interpretation from the race course etymology of curriculum, currere refers to the running of the race and emphasizes the individual's own capacity to reconceptualize his or her autobiography. The individual seeks meaning amid the swirl of present events, moves historically into his or her own past to recover and reconstitute origins, and imagines and creates possible directions of his or her own future. Based on the sharing of autobiographical accounts with others who strive for similar understanding, the curriculum becomes a reconceiving

⁸ Muh Nur El Ibrahim Solihin, *Kurikulum Pembelajaran*, h. 1.

⁹ *Ibid*, h. 4

¹⁰ Murray, Print, *Curriculum Development Theory And Design*, St. Leonard: Allen & Unwin Pty, Ltd, 1993, h. 15.

*of one's perspective on life. It also becomes a social process whereby individuals come to greater understanding of themselves, others, and the world through mutual reconceptualization. The curriculum is the interpretation of lived experiences.*¹¹

Kurikulum merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang sangat vital. Oleh karena itu, kurikulum perlu dikelola dengan sebaik-baiknya. Dan dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan manajemen kurikulum agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berjalan lebih efektif, efisien, dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber belajar, pengalaman belajar, maupun komponen kurikulum. Dalam bahasa Arab, istilah “kurikulum” diartikan dengan *Manhaj*, yakni jalan yang terang, atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada bidang kehidupannya.¹² Dalam konteks pendidikan, kurikulum berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidik/guru dengan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta nilai-nilai. Al-Khauily yang dikutip Sulistyorini menjelaskan *Al-Manhaj* sebagai seperangkat rencana dan media untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan.¹³

Kurikulum berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan tujuan pendidikan pada jenis/jenjang/satuan pendidikan yang pada gilirannya merupakan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian kurikulum merupakan salah satu factor dalam proses pendidikan yang

¹¹ Patrick Slattery, *Curriculum Development In The Postmodern Era*, New York: Routledge, cet. II, 2006, h. 63

¹² Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam Konsep, Strategi dan Aplikasi*, h.39

¹³ *Ibid*, h. 39.

berperan sebagai perangkat lunak dari proses tersebut. Kurikulum mempunyai peran sentral karena menjadi arah atau titik pusat dari proses pendidikan. Peran kurikulum dalam proses pendidikan sangat penting dan strategis.

Manajemen kurikulum merupakan suatu kegiatan penting dalam sebuah organisasi sekolah, karena kurikulum merupakan salah satu komponen sekolah yang harus dikelola dengan baik. Kurikulum sekolah merupakan instrumen strategis untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang, kurikulum sekolah juga memiliki koherensi yang sangat dekat dengan upaya pencapaian tujuan sekolah. Rusman mengemukakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.¹⁴

2. Fungsi-fungsi Manajemen Kurikulum

Fungsi manajemen Kurikulum perencanaan menempati fungsi pertama dan utama diantara fungsi-fungsi lainnya, Sukanto Reksohadiprodjo mengatakan bahwa fungsi dasar manajemen suatu usaha merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinir serta mengawasi kegiatan dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.¹⁵ Ada beberapa ahli yang mengemukakan

¹⁴ Rusman, *Manajemen Kurikulum*, Cet.3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, h.3.

¹⁵ Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, *Education Management Analisis Teori dan Praktik*, Jakarta:Raja wali Pers,2008, h. 107-108.

tentang fungsi-fungsi manajemen dalam hal ini pendapat yang dipakai peneliti, pendapat Koontz & O'donnel dikutip oleh Rusman, yaitu:¹⁶

a. Model Pencanaan Kurikulum

Perencanaan kurikulum merupakan kegiatan yang kompleks yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Maka dalam mendiskusikan dan mengkoordinasikan proses diperlukan model-model dalam penyajiannya, yakni berdasarkan asumsi – asumsi rasionalitas tentang pemrosesan informasi atau data secara cermat.

Adapun model – model dalam perencanaan kurikulum yang disebutkan oleh Oemar hamalik adalah :¹⁷

- Model Perencanaan Rasional Deduktif atau Rasional Tyler, menitikberatkan logika dalam merancang program kurikulum dan bertitik tolak dari spesifikasi tujuan (*Goals and Objectives*). Namun model ini cenderung mengabaikan masalah – masalah dalam lingkungan tugas. Model ini dapat diterapkan pada semua tingkat pembuatan keputusan namun lebih cocok digunakan untuk sistem pendidikan yang sentralistik yang menitikberatkan pada sistem perencanaan pusat, dimana kurikulum dianggap sebagai suatu alat untuk mengembangkan atau mencapai tujuan di bidang sosial ekonomi.
- Model Interaktif Rasional (*The rasional-interactive model*), memandang rasional sebagai tuntutan kesepakatan antara

¹⁶ Rusman , *Manajemen Kurikulum*, h. 122

¹⁷Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, h. 153-154.

pendapat – pendapat yang berbeda, yang tidak mengikuti urutan logik. Model ini seringkali dinamakan model situasional, asumsi rasionalitasnya ,menekankan pada respons fleksibel kurikulum yang tidak memuaskan dan inisiatif pada tingkat sekolah atau tingkat lokal., implementasi rencana merupakan fase krusial dalam pengembangan kurikulum, dimana diperlukan saling beradaptasi antara perencana dan pengguna kurikulum.

- “The Disciplines Model”, perencanaan ini menitikberatkan pada guru – guru, mereka sendiri yang merencanakan kurikulum berdasarkan pertimbangan sistematis tentang relevansi pengetahuan filosofis, sosiologi dan psikologi.
- Model tanpa perencanaan (non planning model), adalah suatu model berdasarkan pertimbangan – pertimbangan intuitif guru – guru didalam ruang kelas sebagai bentuk pembuatan keputusan.

Secara umum dalam sebuah perencanaan kurikulum dapat mengandung keempat tipe diatas, namun untuk membedakannya antara satu dengan yang lain, diperlukan analisis variabel kebermaknaan bagi praktek perencanaan.¹⁸ Perencanaan berarti memutuskan apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang akan melakukannya, dan bilamana akan dilakukan. Perencanaan pada dasarnya merupakan satu siklus tertentu dan melalui siklus sejak awal persiapan sampai pelaksanaan dan penyelesaian

¹⁸ *Ibid*, 155.

perencanaan. Rencana-rencana dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi tujuan-tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk pencapaian tujuan-tujuan itu. Di samping itu, rencana memungkinkan :

- 1) Organisasi bila memperoleh dan mengikat sumber daya-sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan.
 - 2) Para anggota organisasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur terpilih.
 - 3) Kemajuan dapat terus dimonitor dan diukur sehingga tindakan korektif dapat diambil jika tingkat kemajuan tidak meningkat.
- Perencanaan adalah a) pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi, dan b) penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.¹⁹ Semua fungsi lainnya sangat tergantung pada fungsi ini, dimana fungsi lain tidak akan berhasil tanpa perencanaan dan pembuatan keputusan yang tepat, cermat dan kontinyu. Tetapi sebaliknya, perencanaan yang baik tergantung pelaksanaan efektif fungsi-fungsi lain.

b. Pengorganisasian (*Organizing*) Kurikulum

¹⁹ *Ibid*, h. 123

Organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada murid – murid.²⁰ Organisasi kurikulum ini sangat erat kaitannya dengan pencapaian tujuan pendidikan, karena kurikulum memuat aturan – aturan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Suryosobroto pola pengorganisasian kurikulum ada 3 macam:²¹

1. Separated Subject Curriculum

Kurikulum model ini menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran (subjects) yang terpisah – pisah satu sama lain, seakan – akan ada batas pemisah antara mata pelajaran yang satu sama lain, juga antara suatu kelas dengan kelas lain.

2. Correlated Curriculum

Pada dasarnya organisasi kurikulum ini menghendaki agar mata pelajaran satu sama lain ada hubungan, bersangkutan paut (Correlated) walaupun mungkin batas – batas yang satu dengan yang lain, masih dipertahankan.

3. Integrated Curriculum

Kurikulum ini meniadakan batas – batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan.

Setelah para manajer menetapkan tujuan-tujuan dan menyusun rencana-rencana atau program-program untuk mencapainya, maka perlu

²⁰ Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004, h. 33

²¹ *Ibid*, h. 34

merancang dan mengembangkan suatu organisasi yang akan dapat melaksanakan berbagai program tersebut secara sukses.

Pengorganisasian adalah menciptakan suatu struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sehingga hubungan mereka satu sama lain dalam organisasi dipengaruhi oleh hubungan keseluruhan dalam sistem.²² Sedangkan Pengorganisasian menurut Hodgetts yang dikutip oleh Rosyada, merupakan pendistribusian tugas kepada anggota sekolah, serta mengoordinasi seluruh usaha dan upaya agar tujuan yang telah dirumuskan dapat dicapai secara efisien.²³

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa pengorganisasian adalah suatu usaha untuk menstrukturkan dan menetapkan kerjasama diantara orang-orang dalam kelompok yang meliputi menetapkan tugas, wewenang, tanggung jawab serta tata hubungan kerja masing-masing.

c. Penyusunan Personalia (*Staffing*)

Penyusunan personalia adalah penarikan (*recruitment*), latihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. Dalam pelaksanaan fungsi ini, manajemen menentukan persyaratan-persyaratan mental, fisik dan emosional untuk posisi-posisi jabatan yang ada melalui analisa jabatan, deskripsi jabatan, dan spesifikasi

²² Syaiful Sagala, *Manajemen Berbasis Sekolah & Masyarakat Strategi Memenangkan Persaingan Mutu*, Cet. 3, Jakarta: PT. Nimas Multima, 2006, h. 23.

²³ Dede, Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokrasi: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*., Jakarta: Prenada Media Group, 2007, h. 237.

jabatan dan kemudian menarik karyawan yang diperlukan dengan karakteristik-karakteristik personalia tertentu seperti keahlian, pendidikan, umur, latihan dan pengalaman. Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan seperti pembuatan sistem penggajian untuk pelaksanaan kerja yang efektif, penilaian karyawan untuk promosi, transfer, atau bahkan demosi dan pemecatan, serta latihan dan pengembangan karyawan.

d. Pengarahan (*Leading*)

Sesudah rencana dibuat, organisasi dibentuk dan disusun personalianya, langkah berikutnya adalah menugaskan karyawan untuk bergerak menuju tujuan yang telah ditentukan. Fungsi pengarahan secara sederhana adalah untuk membuat atau mendorong para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Fungsi ini melibatkan kualitas, gaya dan kekuasaan pemimpin serta kegiatan-kegiatan kepemimpinan serta komunikasi, motivasi dan disiplin. Fungsi leading sering disebut dengan *directing*, *monitoring*, *actuating*, dll. Bila fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak menyangkut aspek-aspek abstrak proses manajemen, kegiatan pengarahan langsung menyangkut orang-orang dalam organisasi.

e. Pengawasan (*controlling*)

Semua fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan (*controlling*) atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Pengawasan adalah suatu usaha untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan.²⁴ penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat positif maupun negatif. Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efektif dan efisien. Pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi atau terjadi kembali. Pengertian pengawasan lebih bersifat operasional, menekankan kepada upaya untuk melakukan perbaikan ke dalam.

Antony, Dearden, dan bedford yang dikutip Syaiful Sagala, mendefinisikan pengawasan adalah suatu konsep yang luas yang dapat diterapkan pada manusia, benda dan organisasi.²⁵ Sedangkan Terry yang dikutip Syaiful Sagala menyatakan bahwa *controlling* sebagai pengukuran dan koreksi atas pelaksanaan kerja dengan maksud untuk mewujudkan kenyataan atau menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan rencana yang disusun dapat dilaksanakan dengan baik.²⁶ Pengawasan akan

²⁴ Sulistyorini, *Manajemen Pendidikan Islam Konsep, Strategi dan Aplikasi*, h.32.

²⁵ Syaiful Sagala, *Manajemen Berbasis Sekolah & Masyarakat Strategi Memenangkan Persaingan Mutu*, h. 26.

²⁶ *Ibid*, h. 27.

menjamin pekerjaan-pekerjaan dari organisasi bisnis atau perusahaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.²⁷

Berdasarkan definisi di atas, memberikan gambaran bahwa adanya keterkaitan antara perencanaan dengan pengawasan dan bahkan dengan fungsi-fungsi manajemen yang lain. Pengawasan membantu dalam memberikan penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia dan pengawasan sudah dilaksanakan.

Rusman mengatakan bahwa fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup empat unsur yaitu (1) penetapan standar pelaksanaan, (2) penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan, (3) pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan, dan (4) pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar.²⁸

3. Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural

Pendidikan adalah perubahan dalam dan perubahan tingkah laku. Apabila disebut pendidikan islam ia menjadi lebih khusus dan bermaksud pendidikan yang berdasarkan syari'at islam yang berpadukan Al-qur'an dan hadist, dan perubahan yang dikehendaki pula ialah perubahan rohani, akhlak dan tingkah laku menurut Islam.²⁹

Kurikulum pendidikan agama Islam memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-cirinya sebagai berikut:

²⁷ Ayon Triyono, *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cet.I, Jakarta: PT. Suka Buku, 2012, h. 24

²⁸ Rusman, *Manajemen Kurikulum*, h. 126

²⁹ *Ibid*, h. 41

- a. Menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan, kandungan, metode, alat, dan teknik.
- b. Memiliki keseimbangan antara kandungan kurikulum dari segi ilmu dan seni, kemestian, pengalaman, dan kegiatan pengajaran yang beragam.
- c. Memiliki perhatian yang luas dan kandungan yang menyeluruh. Maksudnya ialah aspek pribadi siswa tepat pada sasaran terutama aspek pribadi siswa yaitu jasmani, akal, dan rohani.
- d. Berkecenderungan pada seni halus, aktivitas pendidikan jasmani, latihan militer, pengetahuan teknik, latihan kejuruan, dan bahasa asing untuk perorangan maupun bagi mereka yang memiliki kesediaan, bakat, dan keinginan.
- e. Keterkaitan kurikulum dengan kesediaan, minat, kemampuan, kebutuhan, dan perbedaan perorangan di antara mereka.³⁰

Ciri-ciri ini menggambarkan adanya berbagai tuntutan yang harus ada dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Tuntutan ini terus berkembang sesuai dengan tantangan zaman yang sedang dihadapi. Tuntutan zaman Islam sekarang lebih kompleks. Oleh sebab itu perlu adanya ciri-ciri permanen dan ciri-ciri responsif terhadap tuntutan zaman di dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Di samping ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam, juga terdapat prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar kurikulum pendidikan agama Islam, yaitu sebagai berikut:

- a. Pertautan yang sempurna dengan agama, termasuk ajaran-ajaran dan nilai-nilainya.
- b. Prinsip menyeluruh (universal) pada tujuan-tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum.
- c. Keseimbangan yang relatif antara tujuan-tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum.
- d. Ada pertautan antara bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan pelajar.
- e. Pemeliharaan perbedaan individual di antara pelajar dalam bakat, minat, kemampuan, kebutuhan, dan masalahnya serta memelihara perbedaan di antara alam sekitar dan masyarakat.
- f. Prinsip perkembangan dan perubahan.

³⁰ Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam (Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam)*, Malang: Erlangga, 2007, h.151.

- g. Prinsip pertautan antar mata pelajaran, pengalaman, dan aktivitas yang terkandung dalam kurikulum.³¹

Di antara ketujuh prinsip tersebut salah satu terdapat prinsip pengembangan dan perubahan. Prinsip ini menunjukkan adanya dinamika dari kondisi yang serba kekuarangan menuju kondisi yang lebih sempurna atau perubahan yang positif-konstruktif. Mengingat perkembangan sains dan teknologi telah terjadi perubahan-perubahan yang cepat sekali. Pada akhirnya perubahan itu mempengaruhi konsep pendidikan tanpa mengenal batas akhir, sebab banyak persoalan yang harus dihadapi oleh pendidikan.

Kata “*multicultural*” menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia berasal dari dua akar kata yaitu “*multi*” berarti lebih dari satu, banyak , berlipat ganda,³² dan “*kultur*” berarti kebudayaan, cara pembudidayaan, cara pemeliharaan.³³ Dalam M. Ainul Yaqin,³⁴ ada banyak ilmuwan dunia yang memberikan definisi kultur. Mereka antara lain: Elizabet B. Taylor (1832-1917) dan L.H. Morgan yang mengartikan kultur sebagai sebuah budaya yang universal bagi manusia dalam berbagai macam tingkatan yang dianut oleh seluruh anggota masyarakat. Emile Durkheim (1858-1917) dan Marcel Maus (1872-1950) menjelaskan bahwa kultur adalah sekelompok masyarakat yang menganut sekumpulan symbol-simbol yang mengikat di dalam sebuah masyarakat yang diterapkan. Franz Boas (1858-1942) dan A.L. Kroeber (1876-1960) mendefinisikan bahwa kultur adalah

³¹ *Ibid*, h. 152

³² Susilo Riwayadi dan Suci Nuranisyah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Sinar Terang, 2009, h. 487

³³ *Ibid*, h. 413

³⁴ M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural , Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005, h.27-28

hasil dari sebuah sejarah-sejarah khusus untuk umat manusia yang melewatinya secara bersama-sama di dalam kelompoknya. A.R. Radcliffe Brown (1881-1955) dan Bronislaw Malinowski (1884-1942) menggambarkan kultur sebagai sebuah praktik sosial yang memberi support terhadap struktur sosial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu dan lain-lainnya. Pendidikan agama di sekolah dasar memiliki landasan dan idiologis dan konstitusional, karena Negara (dalam UUD 29) memberikan hak hidup kepada agama-agama, bahkan berhak mengatur kehidupan beragama bangsanya termasuk pendidikan agama.³⁵

Pendidikan multikultural sebagai wacana baru di Indonesia dapat diimplementasikan tidak hanya melalui pendidikan formal namun juga dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat maupun dalam keluarga. Dalam pendidikan formal pendidikan multikultural ini dapat diintegrasikan dalam sistem pendidikan melalui kurikulum mulai Pendidikan Usia Dini, SD, SLTP, SMU maupun Perguruan Tinggi. Sebagai wacana baru, Pendidikan Multikultural ini tidak harus dirancang khusus sebagai muatan substansi tersendiri, namun dapat diintegrasikan dalam kurikulum yang sudah ada tentu saja melalui bahan ajar atau model pembelajaran yang paling memungkinkan diterapkannya pendidikan multikultural ini, di Sekolah Dasar misalnya, dari segi substansi, pendidikan multikultural ini dapat diintegrasikan dalam kurikulum yang berperspektif multikultural, Melalui mata pelajaran Pendidikan Agama

³⁵ Ali Sibram, Malisi, *Pendidikan Multikultural*, Jakarta:Pustaka firdaus, 2005, h. 93

Islam dalam bahan ajar seperti Agama, dan dapat melalui model pembelajaran yang lain seperti melalui kelompok diskusi, kegiatan dan ekstrakurikuler.³⁶

Definisi pendidikan multikultural sangat banyak dan beragam. Di antaranya disebutkan bahwa pendidikan multikural merupakan:³⁷

- a. Suatu program dan praktik pendidikan yang didesain untuk memperbaiki pencapaian akademik pada kelompok etnis dan imigran dan mengajarkan pada kelompok masyarakat yang mayoritas tentang budaya-budaya dan pengalaman-pengalaman kaum minoritas tersebut.
- b. Suatu pengetahuan yang menanamkan kesadaran diri seseorang akan arti perbedaan antar sesama manusia dan berbagai budaya dan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Dengan kesadaran tersebut diharapkan dapat digunakan untuk merespon perubahan demografis dan kultural dari suatu masyarakat atau bahkan dunia secara keseluruhan dan dapat digunakan untuk hidup saling menghargai, tulus dan toleran dalam menghadapi keragaman tersebut.³⁸
- c. Suatu pendekatan progresif untuk pentransformasian pendidikan yang kritis-holistik dan berpusat pada kelemahan, kegagalan dan diskriminasi dalam praktek-praktek pendidikan.³⁹
- d. Pendidikan multikultural diartikan sebagai pendidikan untuk *people of colour*. Dalam artian bahwa pendidikan multikultural merupakan

³⁶ *Ibid.*, h. 94

³⁷ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, h. 167

³⁸ *Ibid.*, h. 168

³⁹ Maftuh, *Makalah Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme (Tinjauan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam)*, Yogyakarta: UIN sunan kalijaga 2008. h. 9

bentuk pendidikan yang arahnya untuk mengeksplorasi berbagai perbedaan dan keragaman, karena perbedaan dan keragaman merupakan suatu keniscayaan.

- e. Pendidikan multikultural merupakan pengembangan kurikulum dan aktivitas pendidikan maupun sebagai respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok.
- f. Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai Wacana pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia yang digemakan melalui berbagai seminar, simposium, maupun media massa dilatarbelakangi oleh fakta bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak persoalan tentang eksistensi sosial, etnik, dan kelompok keagamaan yang beragam. Persoalan tersebut disebabkan oleh adanya upaya penyeragaman dalam berbagai aspek kehidupan yang dilakukan oleh pemerintah pada masa Orde Baru. Selama Orde baru berkuasa, pemerintah mengabaikan perbedaan yang ada, baik dari segi suku, bahasa, agama, maupun budayanya.⁴⁰

Dari pengertian pendidikan dan pengertian multikultural di atas, maka para ahli pun beragam pula dalam mendefinisikan tentang "*Pendidikan Multikultural*". Keberagaman didefinisikan itu diantaranya, Choirul Mahfud, mengutip pendapat para pakar, yaitu: Anderson dan

⁴⁰ Aly, Abdullah, *Pendidikan Islam Multikultural Di Pesantren*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2011, h. 98

Chusher (1994) menyatakan bahwa pendidikan multicultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. James Bank (1993) mendefinisikan pendidikan multicultural sebagai pendidikan untuk *people for color*. Artinya, pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan (*anugerah tuhan/sunatullah*). Kemudian bagaimana kita mampu mensikapi perbedaan tersebut dengan penuh toleran dan semangat egaliter. Sejalan dengan pemikiran di atas, Muhaemin El-Ma'hady berpendapat bahwa secara sederhana pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan cultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan (*global*). Hilda Hernandez mengartikan pendidikan multikultural sebagai perspektif yang mengakui realitas politik, social, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras dan gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, dan pengecualian-pengecualian dalam proses pendidikan.⁴¹

Wacana multikultural di Indonesia mulai terbentuk alurnya ketika Mukti Ali merumuskan program besarnya, yaitu program pembinaan kerukunan hidup beragama di Indonesia yang dikembangkan dalam format Trilogi Kerukunan yaitu (1) Kerukunan *intern* umat beragama, suatu upaya dialogis menyangkut aspek-aspek pemikiran keagamaan, gerakan,

⁴¹ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, h. 175-176.

peran sosial, dan sebagainya dalam satu agama demi kepentingan agama tersebut dan kepentingan bangsa secara keseluruhan.(2) kerukunan antar umat beragama, yaitu suatu upaya dialogis antar kelompok agama yang berbeda (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, agama lainnya, dan aliran kepercayaan). (3) Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, yaitu suatu upaya dialogis antara rakyat pemeluk agama dengan pemerintah dalam rangka meningkatkan peran agama dan umat beragama dalam pembangunan nasional.⁴²

Keberhasilan Mukti Ali dalam menjalankan program ini ditunjang oleh latar keahliannya sebagai ahli Ilmu Perbandingan Agama yang diakui kepakarannya di Indonesia.⁴³ Dalam pendidikan multikultural juga menggunakan konsep yang terdapat pada semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Negara Indonesia yang memiliki berbagai suku, ras, agama, bahasa, dan kebudayaan seharusnya dapat disatukan dengan menerapkan semboyan negara kita, namun kenyataannya berbeda, masih banyak penduduk Indonesia yang bertikai karena masalah suku, ras, agama, dan kebudayaan. Jadi, disamping menerapkan semboyan tersebut, upaya untuk menyelesaikan masalah yang melanda negeri ini adalah dengan menggunakan konsep-konsep kearifan lokal yang banyak di temui di berbagai kelompok masyarakat Indonesia dan rujukan-rujukan teoritis yang di dasarkan pada kasus-kasus lokal Indonesia.

⁴² Dody S. Taruna, *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010, h. 81

⁴³ *Ibid.*, h.101

Menurut Tilaar bahwa untuk merekonstruksi konsep pendidikan multikultural, ia menegaskan tiga lapis diskursus yang berkaitan, yaitu:⁴⁴

1. Masalah kebudayaan. Dalam hal ini terkait masalah-masalah mengenai identitas budaya suatu kelompok masyarakat atau suku. Bagaimana hubungan antara kebudayaan dengan kekuasaan dalam masyarakat sehubungan dengan konsep kesetaraan di masyarakat. Apakah kelompok-kelompok dalam masyarakat mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam kesempatan mengekspresikan identitasnya di masyarakat.
2. Kebiasaan-kebiasaan, tradisi, dan pola-pola kelakuan yang hidup di dalam suatu masyarakat.
3. Kegiatan atau kemajuan tertentu (*achievement*) dari kelompok-kelompok dalam masyarakat yang merupakan identitas yang melekat pada kelompok tersebut. Dalam hal ini Tilaar menegaskan bahwa dalam praktisi pendidikan, praktik-praktik kebudayaan yang dilakukan oleh kelompok dalam masyarakat itu lebih penting dari pada sekedar pengembangan wacana mengenai masalah kebudayaan. Praktik-praktik tersebut kemudian diamati apakah ada prestasi yang menonjol yang dimiliki atau ditunjukkan oleh suatu kelompok dalam masyarakat yang dapat dijadikan contoh dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak menimbulkan prasangka yang negatif dari kelompok lain atas prestasi

⁴⁴ H.A.R Tilaar, *Kekuasaan Dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, h. 207

dari kelompok tersebut. Selain itu, Tilaar juga menguraikan persoalan-persoalan dasar untuk membangun konsep pendidikan multikultural.⁴⁵

4. Hak orang tua dalam menentukan pendidikan anaknya.

Dalam menegaskan konsep pendidikan multikultural, Tilaar mengacu pada konsep C.I. Bennet yang menunjukkan dua aspek mendasar, yaitu nilai inti dan tujuan pendidikan multikultural. Nilai-nilai inti tersebut mencakup:⁴⁶ 1) Apresiasi terhadap adanya kenyataan pluralisme budaya dalam masyarakat; 2) Pengakuan terhadap harkat manusia dan hak asasi manusia; 3) Pengembangan tanggung jawab masyarakat dunia, dan 4) Pengembangan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi.

Berdasarkan nilai inti tersebut maka dirumuskan enam tujuan, yaitu:⁴⁷

- a. Mengembangkan perspektif sejarah yang beragam dari kelompok-kelompok masyarakat.
- b. Memperkuat kesadaran budaya yang hidup di masyarakat.
- c. Memperkuat kompetensi interkultural dari budaya-budaya yang hidup di masyarakat.
- d. Membasmi rasisme, seksisme, dan berbagai jenis prasangka
- e. Mengembangkan kesadaran atas kepemilikan planet bumi
- f. Mengembangkan ketrampilan aksi sosial.

⁴⁵ *Ibid.*, h.208

⁴⁶ Dody S. Taruna, *Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikulturalisme*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010, h. 81

⁴⁷ H.A.R Tilaar, *Kekuasaan Dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*, h. 209-210

Dengan demikian, kurikulum pendidikan berbasis multicultural adalah sebuah kurikulum yang mengacu pada keragaman budaya, yang mana kurikulum tersebut senantiasa mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan (*anugerah tuhan/sunatullah*).

Penyajian materi pembelajaran agama Islam di Sekolah Dasar (SD) sedikit berbeda dengan materi yang di pelajari di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN). Pada materi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Pendidikan Agama Islam (PAI) diberikan secara terpisah dengan buku teks yang terpisah pula, sedangkan pelajaran PAI di Sekolah Dasar (SD) dipelajari secara global dengan materi yang simpel dan terintegrasi (disatukan), ini dapat terlihat dari bentuk materi seperti Al-Qur'an-Hadits, Fiqih, Akidah, Akhlak, dan Tarikh Islam yang dipelajari terintegrasi dalam satu buku teks Pendidikan Agama Islam.⁴⁸

Pembahasan mengenai Materi PAI dalam lingkup multikultural, sejauhmana kajian tentang multikultural terdapat dalam pokok bahasan yang dipelajari dalam materi Pendidikan Agama Islam (PAI) di SD mulai dari kelas I (satu) sampai kelas VI (enam), seperti peneliti analisa dalam sub bab sebelumnya bahwa pelajaran PAI di SD terakumulasi dalam berbagai aspek materi yang terintegrasi dan tidak terpisah, sehingga pembahasannya cukup global.

⁴⁸ Yusanto ismail, et.al, *Menggagas Pendidikan Islami*, cet 2, Bogor: 2011, h. 184

4. Pengembangan Kurikulum Berbasis Multikultural

Adapun pengembangan kurikulum berbasis multikultural bila dikaitkan dengan pendidikan agama Islam harus memperhatikan dasar kurikulum PAI sebagaimana yang dikemukakan Ramayulis,⁴⁹ dengan mengutip Herman H. Horne ada 3 macam yaitu:

1. **Dasar Psikologis**, yang digunakan untuk memenuhi dan mengetahui kemampuan yang diperoleh dari pelajar dan kebutuhan anak didik (*the ability and need of children*)
2. **Dasar Sosiologis**, yang digunakan untuk mengetahui tuntutan yang sah dari masyarakat.
3. **Dasar Filosofis**, yang digunakan untuk mengetahui keadaan alam semesta tempat kita hidup (*the kind of universe in which we live*).

Begitu pula dalam mengembangkan kurikulum pendidikan Islam berbasis multicultural harus memperhatikan prinsip-prinsip yang menjadi acuan kurikulum pendidikan Islam yang menurut Ramayulis, adalah:⁵⁰

1. Berorientasi pada Islam, termasuk ajaran-ajaran dan nilai-nilainya. Maka setiap yang berkaitan dengan kurikulum, termasuk falsafah, tujuan-tujuan, kandungan-kandungan, metode mengajar, cara-cara perlakuan dan hubungan-hubungan yang berlaku dalam lembaga-lembaga pendidikan yang berdasarkan pada agama dan akhlak Islam.
2. Prinsip menyeluruh (*universal*) pada tujuan-tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum.

⁴⁹ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2002, h.131

⁵⁰ *Ibid*, h. 132-133

3. Prinsip keseimbangan yang elative antara tujuan-tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum.
4. Prinsip interaksi antara kebutuhan siswa dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
5. Prinsip pemeliharaan perbedaan-perbedaan individual diantara peserta didik, baik perbedaan dari segi bakat, minat, kemampuan, kebutuhan dan sebagainya.
6. Prinsip perkembangan dan perubahan sesuai dengan tuntutan yang ada dengan tidak mengabaikan nilai-nilai absolute.
7. Prinsip pertautan (*integritas*) antara mata pelajaran, pengalaman-pengalaman dan aktifitas yang terkandung didalam kurikulum, begitu pula dengan pertautan antara kandungan kurikulum dengan kebutuhan murid juga kebutuhan masyarakat.

Zakiah Dradjat [19] menawarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:⁵¹

- a. **Prinsip Relevansi:** dalam arti kesesuaian pendidikan dalam lingkungan hidup murid, relevansi dengan kehidupan masa sekarang dan akan datang, relevansi dengan tuntutan pekerjaan.
- b. **Prinsip Efektifitas:** baik efektifitas mengajar guru, ataupun efektifitas belajar murid.
- c. **Prinsip Efisiensi:** baik dalam segi waktu, tenaga dan biaya.
- d. **Prinsip Fleksibilitas:** artinya ada semacam ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan dalam bertindak, baik yang berorientasi

⁵¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Angkasa, 1992, h. 125-127

pada fleksibilitas pemilihan program pendidikan maupun dalam mengembangkan program pengajaran.

Dengan demikian, dari berbagai dasar dan prinsip-prinsip diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengembangkan kurikulum berbasis multikultural dalam Pendidikan Agama Islam, merupakan hal yang mudah dirubah. Karena setiap kurikulum dipersiapkan hanya untuk masa tertentu dan tempat tertentu, maka aspek *elastisitas*, *integritas*, dan *efektifitas* menjadi sangat penting untuk dituangkan kedalam isi kurikulum. Kurikulum yang berorientasi kepada masa lalu cenderung menciptakan *image diri (self image)* yang eksklusif dan anti perubahan.

Urgensi pendidikan multikultural di Indonesia. Diantaranya yang penting untuk diketahui adalah: **pertama**, pendidikan multikultural berfungsi sebagai sarana alternatif pemecahan konflik; **kedua**, dengan pelajaran pendidikan berbasis multicultural, siswa diharapkan tidak tercerabut dari akar budayanya; **ketiga**, pendidikan multikultural relevan di alam demokrasi seperti saat ini.⁵²

Untuk mewujudkan multikultural dalam dunia pendidikan, maka pendidikan multikultural juga perlu dimasukkan ke dalam kurikulum nasional, yang pada akhirnya dapat menciptakan tatanan masyarakat Indonesia yang multikultural, serta upaya-upaya lain yang dapat dilakukan guna mewujudkannya. Upaya-upaya tersebut adalah sebagai

⁵² Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. V, 2011, h. 215

berikut:⁵³ (1) Sebagai sarana alternatif pemecahan konflik budaya, (2) Supaya siswa tidak tercerabut dari akar budaya, (3) Sebagai landasan pengembangan Kurikulum Nasional.⁵⁴

5. Tujuan Kurikulum Berbasis Multikultural

Sedangkan tujuan kurikulum berbasis pendidikan multikultural yaitu:

- a. Tujuan *attitudinal* (sikap), yaitu membudayakan sikap sadar, sensitif, toleran, respek terhadap identitas budaya, responsif terhadap berbagai permasalahan yang timbul di masyarakat.
- b. Tujuan kognitif, yaitu terkait dengan pencapaian akademik, pembelajaran berbagai bahasa, memperluas pengetahuan terhadap kebudayaan yang spesifik, mampu menganalisa dan menginterpretasi tingkah laku budaya dan menyadari adanya perspektif budaya tertentu.⁵⁵
- c. Tujuan instruksional, yaitu menyampaikan berbagai informasi mengenai berbagai kelompok etnis secara benar di berbagai buku teks maupun dalam pengajaran, membuat strategi tertentu dalam menghadapi masyarakat yang plural, menyiapkan alat yang konseptual untuk komunikasi antar budaya dan untuk pengembangan ketrampilan, mempersiapkan teknik evaluasi dan membuka diri untuk mengklarifikasi dan penerangan mengenai nilai-nilai dan dinamika budaya.

⁵³ *Ibid.*, h. 216

⁵⁴ Zakiyuddin, Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, h. 78-84

⁵⁵ Kasinyo Harta, *Model Pengembangan Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural*, Cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 78

Dari tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum berbasis multikultural dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk berpartisipasi didalam demokrasi dan kebebasan bermasyarakat.

Banyaknya masalah dalam membangun pendidikan berbasis multikultural di Indonesia merupakan masalah bersama dari pemerintah, sekolah, keluarga dan lingkungan. Adanya kerjasama dari ketiga pihak tersebut untuk mendidik anak melalui pendekatan berbasis multikultural bisa dijalani anak dimanapun dia berada. Jadi pendidikan multikultural dapat anak dapatkan tidak hanya di sekolah melainkan di semua situasi yang membuat pendidikan multikultural itu terus-menerus berlangsung.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Ada banyak lagi tulisan berbentuk buku hasil penelitian, jurnal, artikel, yang membahas tentang manajemen kurikulum pendidikan agama islam berbasis multikultural, sehingga menurut pandangan penulis, beberapa penelitian dibawah ini dalam kesimpulannya belum menggambarkan secara jelas bagaimana manajemen kurikulum pendidikan agama islam SDN percobaan palangkaraya.

Penelitian ini memfokuskan pada manajemen kurikulum pendidikan agama islam berbasis multikultural di SDN Percobaan Palangka Raya. Beberapa upaya telah dilakukan untuk menelusuri penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Upaya tersebut dilakukan dengan cara menelusuri atau *membrowsing* dipelbagai referensi baik melalui literature-

literatur yang berbentuk skripsi, tesis, disertasi atau pun buku dan jurnal ilmiah yang telah diterbitkan atau pun belum bahkan termasuk pula artikel-artikel yang diposting di berbagai weblog. Upaya maksimal telah dilakukan dan hanya ada beberapa referensi yang ditemukan berkaitan dengan fokus Penelitian ini sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Mochammad Arifin.⁵⁶ Dengan Judul” *Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Studi Komparasi SDIT Assalamah dengan SDI Istiqomah Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2013/ 2014)*”. permasalahan yang menjadi fokus kajiannya adalah manajemen pembelajaran PAI di SDIT Assalamah dengan SDI Istiqomah sehingga subyek penelitiannya melibatkan kepala sekolah, guru PAI, Waka Kurikulum dan siswa. Metode penelitian yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan analisis datanya adalah teknik analisis diskripsi.
2. Tesis yang ditulis oleh Nur Khayati.⁵⁷ dengan judul “ *Multikulturalisme dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam*” permasalahan yang menjadi fokus kajiannya adalah sejauhmana muatan nilai-nilai multikulturalisme bagi dunia remaja kondusif terimplementasi dalam buku teks PAI di SMA. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan berbagai pandangan, teori dan landasan filosofis yang mendasari konsep terintegrasinya nilai-nilai multikulturalisme dalam buku teks PAI SMA.

⁵⁶ Mochammad Arifin, *Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Studi Komparasi SDIT Assalamah dengan SDI Istiqomah Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Tahun Pelajaran 2013/ 2014)*. STAIN Salatiga: 2013/2014

⁵⁷ Nur Khayati, *Multikulturalisme Dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam*, Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Qalam Cibinong: 2011/2012

3. Tesis yang ditulis oleh Mukharis.⁵⁸ Dengan Judul *Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Pelajaran Al-Qur'an-Hadis (Telaah Materi dalam Program Pengembangan Silabus dan Sistem Penilaian Al-Qur'an-Hadis MA Ali Maksum PP.Krapyak Yogyakarta TA. 2009-2010)*. Dari hasil penelitian diketahui Tesis ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan yaitu mengenai nilai-nilai pendidikan multikultural yang terkandung dalam materi program pengembangan silabus dan sistem penilaian Al-Qur'an-Hadis MA Ali Maksum PP. Krapyak Yogyakarta TA 2009-2010 serta mengetahui kesesuaian terhadap tujuan lembaga Pendidikan MA Ali Maksum. Kurikulum PAI sangat signifikan untuk mentransformasikan nilai-nilai pendidikan multikultural karena tujuan pendidikan tidak akan bisa dicapai tanpa adanya kurikulum, sementara materi dalam pelajaran Al-Qur'an-Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam dan sekaligus menjadi pegangan dan pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari, sehingga materi Al-Qur'an-Hadis akan membentuk dan menentukan sikap keberagamaan seseorang.
4. Tesis Ainun Hakiemah,⁵⁹ berjudul *Nilai-Nilai Dan Konsep Pendidikan Multikultural Dalam Pendidikan Islam*, Ia menyatakan Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui dan mengkaji nilai-nilai pendidikan multikultural yang terdapat dalam ajaran Islam. Selanjutnya dengan mengetahui nilai-nilai tersebut akan digunakan untuk mengetahui

⁵⁸ Mukharis, *Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Pelajaran Al-Qur'an Hadits (Telaah Materi dalam Program Pengembangan Silabus dan sistem Penilaian Al-Qur'an Hadits M.A. Ali Maksum PP Krapyak Yogyakarta: 2009-2010)*, Tesis, UIN: Yogyakarta, 2010.

⁵⁹ Ainun Hakiemah, *Nilai-Nilai Dan Konsep Pendidikan Multikultural Dalam Pendidikan Islam*, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007.

dan mengkaji konsep pendidikan multikultural dalam pendidikan Islam dan pada akhirnya akan dikaji dan diketahui berbagai faktor yang sekiranya akan menjadi penghambat pada saat pendidikan multikultural tersebut diterapkan dalam pendidikan Islam.

5. Tesis Sugeng Purwanto⁶⁰, berjudul *Manajemen Kurikulum Pada SMP alternatif Qaryah Thayyibah di Salatiga*, permasalahan yang menjadi fokus kajiannya adalah pola manajemen pada SMP Alternatif Qaryah Thayyibah Salatiga. Tujuan Penelitiannya menemukan sekaligus mendeskripsikan pola manajemen pada SMP Alternatif Qaryah Thayyibah Salatiga.

Berdasarkan pada kajian pustaka di atas maka perbedaan dengan peneliti yang terdahulu adalah lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, jenis penelitian serta teknik analisis. Sehingga penulis optimis untuk melakukan penelitian dengan judul adalah ***Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural di SDN Percobaan Palangka Raya.***

⁶⁰ Sugeng Purwanto, *Manajemen Kurikulum Pada SMP Alternatif Qaryah Tayyibah Di Salatiga*, Tesis, Universitas Negeri Semarang, 2006.